BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KUD MINO BEAMBANGAN DI MUNCAR BANYUWANGI

Untuk menganalisa tentang pelaksanaan praktek KUD Mino plambangan dalam upaya meningkatkan pendapatan nelayan yang dilaksanakan oleh suku Madura, osing dan Ja wa dalam scup yang terbatas di Kecamatan Muncar dengan scara pinjam uang, jual beli kredit dan pembagian keuntung an yang dilakukan oleh koperasi dengan anggota, maka pernulis membagi beberapa sub bab sebagai berikut:

A. Tinjauan dari segi koperasi

Koperasi pada asalnya berarti bekerja sama. 0leh karena itulah maka hakekatnya semua perkumpulan dan semua pekerjaan yang berlaku atas dasar bekerja
sama, boleh dimasukkan kedalam golongan perkumpulan
koperasi.Kaslan A. Tahir, 1955,22).

Sedang koperasi menurut lembaran negara tahun 1949 No.179 adalah perkumpulan orang-orang atau badan-badan hukum Indonesia, yang memperkenankan anggota-anggotanya keluar masuk, dan atas dasar persamaan, - pertama-tama bertujuan memajukan kepentingan-kepenting an matriil dari pada anggotanya, dengan jalan bersama sama melakukan matapencaharian, dengan jalan pembeli-an keperluan-keperluan mereka, dengan tanggung

menangung sebelah menyebelah (wederkereg) terhadap jiwa, atau dengan pemberian uang muka atau kredit kepada anggota-anggotanya. (J.B. Walters, 1954, -211).

Adapun pengertian koperasi menurut UU No 12 th 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian adalah organisasi rakyat, ekonomi rakyat yang berwatak - sosial, beranggotakan orang-orang, atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. (Pedoman pelaksanaan kebijaksanaan peng embangan dan pembinaan koperasi, 1979, 8).

Pengertian koperasi Mino Blambangan adalah merupakan pengertian yang sepesipik dari pengertian koperasi yang umum, sebagaimana tercantum dalam LN th 1949, No 179 dan dalam UUPP No 12 th = 1967.

Pengertian yang spesifik ini ditentukan - dengan kata simpan pinjam dan jual heli kredit para nelayan. sebagai kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan KUD Mino Blambangan adalah koperasi yang beranggotakan para nelayan dan mempunyai kepen - tingan langsung dalam lapangan perkreditan. (Wawan cara dengan Bapak pimpinan KUD Mino Blambangan).

Dari segi permodalan koperasi Mino Blambangan Muncar tersebut sebagaimana disebutkan dalam bab III diatas dan uraian tentang koperasi di babiini, maka bentuk koperasi tersebut merupakan gabungan antara - dua syirkah yaitu syihkah 'Inan dan syirka Mudharabah dengan alasan sebagai berikut:

1. Koperasi tersebut merupakan kumpulan modal dari sumbangan pemerintah dan juga modal dari beberapa
orang yang ingin meletakan saham kepada koperasiyang nanti pada akhir tahun akan mendapat keuntungan sesuai dengan prosentase besarnya modal yang
ia masukan dengan keuntungan koperasi.

Dengan tidak adanya persyaratan harus sama besar modal masing-masing anggota atas nama perse rikatan atau besarnya keuntungan yang diterima - dari masing-masing anggota, maka bentuk demikian ini identif dengan syirkah 'Inan(Ahmad Azhar Ba - syir, MA, 1987, 53).

2. Disamping para anggota yang menanam modal juga ada para anggota yang tidak menanamkan modal akan tetapi mereka ikut andil dalam mengorbitkan modal koperasi dalam bentuk pinjam meminjam maupun jual beli kredit dan mereka akan mendapatkan sebagiandari keuntungan koperasi pada akhir tutup tahun.

Persekutuan yang terjadi dalam keuntungan saja tidak dalam modal, harta dinamakan syirkah-mudharabah.(Ahmad Azhar Basyir, MA, 1987, 52).

Sistem koperasi yang demikian itu tidak dilarang oleh Islam sebab pada dasarnya semua mu'amalah diperbolehkan oleh syara' selama tidak menyimpang dari prinsip-prinsip pokok mu'amalah. Sehingga boleh menggambil hukum adat (urf) untuk dijadikan dasar pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok peraturan Islam yaitu:

- a. Dilaksanaka dengam suku sama suku
- b. Mengenai sesu<mark>atu</mark> yang <mark>su</mark>ci dan halal
- c. Tidak ada unsur-unsur penipuan atau merugikan fihak lain serta tidak menulitkan peredaran perekonomian masyarakat.
- d. Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara! (DRS. Masduha A.R.1984, 27).

B. Tinjauan tentang pelaksanaan pinjam meminjam

Pelaksanaan pinjam meminjam dalam koperasi mino Blambangan yang prosesnya secara luas telah diterangkan bab III, yang secara garis besarnya dapat dikro nologikan sebagai berikut:

- 1. Anggota yang hendak meminjam harus mendaftarkan dulu.
- 2. Menerima kesepakata dan peraturan sebagai berikut:
 - peminjamom harus menjadi anggota
 - peminjam harus meninggalkan jaminan
- digilib.uinsby.ac.id digilijikavapeminjamby todakib.dapatid melunasi dalam jangka -

waktu yang ditentukan akan dipotong dalam pen jualan ikannya.

- -Peminjam dikenakan bungan 2½% dari peminjaman;
- -Jangka waktu pengembalian ditentukan dalam anggaran dasar koperasi
- -Cara pengembalian dapat dikredit(diangsur)
- -Peminjam harus menjual ikannya kepada koperasi, maka sistem yang demikian tidak dilarang oleh Agama sebab disitu tidak terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip pokok peraturan mu'amalah Islam yaitu:
 - Rela sama rela
 - Mengenai sesuatu yang suci dan halal
- Tidak adanya unsur penipuan dalam pelaksanaan atau merugikan fihak lain serta tidak menyu-litkan peredaran perekonomian masyarakat.
- Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara (DRS Masduha A.R. 1984, 27).

Dalamesistem pinjam meminjam dalam koperasi ini ada tiga hal yang perlu dianalisa agak mendalam yaitu:

- 1. Tentang bunga;
- 2. Tentang syarat bagi anggota harus menjual ikan nya kepada koperasi.
- 3. Tentang jaminan
 Untuk lebih jelasnya akan penulis jelaska sebagai berikut:

1. Tentang bungan

Khusus mengenai bunga 2½% memang banyak mengandung masalah. Terutama kalau dipandang - secara kontektual maka cenderung dikatakan riba yang haram hukumnya. Untuk menentukan apakah - bunga 2½% pada pinjam meminjam di KUD Mino Blam bangan Muncar ini termasuk riba atau tidak maka harus diketahui dulu secara jelas bagaimana sta tus 2½% tersebut. Karena states tersebut akan i kut menentukan apakah bungan 2½% itu riba atau tidak.

Adapun states 2½% tersebut dapat digambar kan :

- 1). Bunga 22% tersebut diambil berdasarkan kesepakatan paracanggota koperasi yang tertuang dalam ADART.
- Bunga tersebut diambil pada waktu si pemin jam menerima uang pinjaman
- 3). Bunga 2½% tersebut merupakan salah satu sumber income koperasi yang nanti pada akhir
 tahun akan dibagikan kepada pengurus, penam
 nam modal dan para anggota sesuai dengan prosentase yang telah disebutkan dalam bab
 III.

Dari statas bunga 2½% tersebut maka, tidaklah dapat secara mutlaq dikatakan riba Nasiah(yang dikarnakan) dalam utang piutang.

Sedangkan menurut pendapat beberapa ulama' fiqh bahwa riba nasiah yang dikarenakan dalam utang piutang sebagaimana riba yang berlaku pada zaman jahiliyah yakni:

1. Menurut Imam Mujtahid

Seorang pada zaman jahiliyah berhutang kepada orang lain, ia berkata akan saya tambah sekian jika kamu memberi tempo kepadaku "maka diberinya tempo itu oleh orang yang mempunyaipiutang.

2. Menurut Abu Bakar al Joshshosh:

Sudah dimaklumi bahwa riba jahiliyah itu semata-mata adalah pinjaman berjangka waktu - dengan kelebihan yang disyaratkan. Maka kelebihan itu adalah ganti(imbalan) dari jangka waktu itu.

3. Menurut Ibnu Hajar al Maliki

Riba nasiah (yang berjangka waktu). Pada zaman jahiliyah sistem ini lebih dikenal, yaitu sesorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan sya rat bahwa ia akan memungut suatu jumlah terten tu setiap bulan, dan modalnya tetap utuh.

Apabila jatuh tempo, dimintanyalah kembali modalnya. Jika tidak sanggup mengembalikan modalitu, ditambahnyalah jumlah haknya (modalnya)dan temponya.

Menurut Ibnu Qotadah riba jahiliyah ialah kelebihan harga barang akibat pembayaran le - wat waktu tertentu. Jika batas waktu itu telah tiba, sedangkan hutangnya belum lunas, ditabah-nya hutang itu dengan mengundurkan lagi pemba - yaran.(DR Hanzah Ya'qub, 1984, 172).

Dari pengertian ini maka jelaslah perbedaan antara riba nasiah yang diharamkan dalam utang piutang sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah dengan bunga 2½% yang berlaku pin jam meminjam KUD Mino Blambangan Muncar Banyuwangi, perbedaan tersebut adalah:

- a. Ide tambahan atau bungan berasal dari pemilik modal atau yang mempunyai piutang, sedangkan dalam KUD Mino Blambangan tersebut bunga 2½% merupakan hasil kesepakatan bersama antara pengurus, pemilik modal dan anggota ketka dalam rapat umum anggota.
- b. Tambahan bungan dalam riba nasiah secara mut lak yang memiliki adalah pemilik modal yang

punya piutang sedangkan dalam KUD MinoBlambangan bunga 2½% tersebut dimakandhan sebagai income ko perasi yang nantinya pada akhir tutup tahun akan dibagi kepada pengurus, pemilik modal dan anggo ta termasuk didalamnya para peminjam itu sendiri.

c. Tambahan dalam riba nasiah timbul karena peminjam tidak dapat melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, dan ia (yang berutang) minta tempo lagi dengan syarat adanya bunga, se
dangkan bunga yang ada pada KUD Mino Blamnaga n
diambil ketika serah terima pinjaman . Dengan
tiga perbedaan diatas jelaslah bahwa bunga 2½%
yang di terapkan pada pinjam meminjam KUD Minp
Blambangan tersebut tidak dapat disamakan dengan
riba nasiah yang diharamkan.

2. Tentang jaminan

Tentang jaminan dalam utang piutang yang dilakukan dalam KUD Mino Blambangan tidaklah merpakan hal yang dilarang sebab menyerahkan barangsebagai tanggungan utang suatu hal dibenarkan oleh
Islam sebagaimana firman Allah dalam suratAlbaqor
roh 283.

وَإِنْ كَنَامُ عَلِي سَفِي وَلَمْ يَجُدُ والسَّارِبَ الْوَرُقَنُ مَنْ سُوحَنا

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mempero leh seorang penulis, maka hendaklah barang tanggungan yang dipegangi(oleh yang berpiutang (Al-Qur'an, 2, 283).

Begitu juga hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainya dari Alsyah yang men nerangkan bahwa Nabi pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi secara utang dan Nabi menga daikan baju besinya kepadanya (orang yahudi iyu), (Masjfut Zuhdi, 1987,530).

Dengan dasar hukum diatas Ulama' sepakattentang bolehnya gadai (hutang dengan jaminan) hanya saja mereka berbeda pendapat apakah gadai
itu boleh dilakukan hanya pada bepergian sebagai
keumuman ayat Al-baqoroh 283 ataukah boleh dilakukan kapan saja.

Wlama' Ad Dhahiri, Mujahid dan Al Dhahak hanya membolehkan gadai (jaminan utang) pada waktu bep pergian saja sebagaimana surat Albaqoroh ayat 283 sedangkan Jumhur Ulama' membolehkan barang jami-nan utang dalam keadaan bepergian maupun dalam keadaan hadir berdasarkan praktek Nabi sendiriyang melakukan gadai di Madin h, sedangkan ayat yang mengaitkan gadai dengan bepergian itu ti dak dimaksudkan sebagai syarat shahnya gadai me lainkan menunjukan bahwa pada umumnya gadai itu

dilakukan pada waktu bepergian(Masjfut zuhdi, 1987,154).

Dengan demikian pelaksanaan jaminan dalam pinjam meminjam di KUD Mino Blambangan Muncar menurut Jumhur Ulama diperbolehkan.

 Tentang syarat bahwa peminjam harus menjual ikan pada koperasi.

ikan kepada koperasi bukan semata-mata merupakan peraturan KUD Mino Blambangan terhadap semua ang ota, bahwa semua anggota KUD harus menjual ikan nya kepada koperasi. Dengan demikian maka disana tidak ada permasalahan baik dalam hubungan intrn KUD, karena ini merupakan kesepakatan maupun - dalam hukum Islam.

C. Tinjauan dari segi jual beli kredit

Sistèm jual beli secara kredit yang dilaksana kan di KUD Mino Blambangan tata caranya sama denganproses pinjam meminjam hanya saja ada perbedaan sedi kit mengenai cara pengembalian dan waktu pengembalian yaitu: pada pinjam meminjam ditentukan batas waktusesuai dengan besar kecilnya uang yang diutang keten tuan tersebut adalah:

- Rp 100.000,- jangka waktunya satu bulan.
- Rp 100.000 is/d Ap 500.000,- jangka waktunya tiga bulan.

- Rp 500.000,- s/d Rp 1.500.000,- jangka waktunya enam bulan.
- Rp 1.500.000,- s/d Rp 5.000.000,- jangka waktunya dimusawarahkan dalam rapat khusus.

Dan pembayaran dalam simpan pinjam ini dapat dikredit dengan tanpa ditentukan jumlah perkreditanya, asal pada jangka waktu yang ditentukan harus sudah lunas. Lain halnya pada jual beli kredit, maka disana diten tukan antara lain yaitu:

- Pembayaran setiap bulan 20% dari harga barang yang dibeli, jadi dalam jangka waktu lima bulan sudah -lunas.
- Kalau tidak dapat melunasi pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka koperasi akan memotong dari sebagian harta penjualan ikan yang dilakukan oleh pembeli sampai hutangnya lunas.

Dalam proses jual beli kredit yang dilakukan oleh KUD tersebut tidak banyak menimbulkan permasa lahan yang perlu dianalisa secara mendalam, namun ada dua masalah yang perlu penulis analisa yaitu:

- 1. Tentang harga jual beli kredit lebih tinggi dari harga umum.
- 2. Tentang disyaratkanya pembeli harus menjual i-kangya pada KUD.

Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tentang harga jual beli kredit lebih tinggi dari harga umum/ kontan.

Jual beli secara kredit (tidak kontan) me mang dibolehkan dalam Islam, hal ini sesuai deng an firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu ber - mu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang, ditentukan ,hendaklah kamu menuliskanya,(Al-Qur'an,2,282).

Namun para Ulama' sedikit berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya jual beli kredit deng ang menaikan harga sehingga harga barang yang dikredit lebih tinggi dari pada harga barang kon tan, hal ini sebagamana yang dipraktekan di KUD Mino Blambangan Muncar.

Menurut ulama' Syafi'iyah, Hanafiyah , Zaid bin Ali Al muayyid Billah dan Jumhur berpendapat bahwa, jual beli kredit dengan harga lebih tinggi dari harga tunai "bolæh" hal ini berdasarkan keumuman dalil yang menetapkan kebolehanya, (Hanzah Ya'qub, 1984, 231).

Kebolehan jual beli kredit dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga kontan sebagai mana yang dipraktekkan oleh KUD Mino Blambangan Muncar selain berdasarkan keumuman dalil juga didukung dengan beberapa kemaslahatan diantarannya yaitu:

- a. Jual beli kredit di KUD Mino Blambangan bannyak membantu para anggota untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebab dengan mengkredit me
 ka dapat mengambil barang-barang yang mereka
 perlukan dengan secepatnya.
- b. Jual beli kredit dengan harga yang lebih tim nggi yang dilakukan oleh KUD Mino Blambangan Muncar merupakan hasil kesepakatan para anggota, dan keuntungan dari jual beli kredit ini termasuk salah sati income KUD yang nanti nya akan dibagi kepada pemi ik modal, pengurus dan para anggotanya termasuk para pembeli.

Dengan dua pertimbangan ini maka jual beli kredit dengan harga lebih tinggi dari pada harga kontan yang dipraktekkan oleh KUD Mino Blambangan tidaklah bertentangan dengan ruhut tasyri' yatitu kemaslahatan.

2. Tentang syzzat pembeli harus menjual ikanya kepada koperasi.

Para pembeli kredit di KUD Mino Blambangan memang diharuskan menjual ikannya pada KUD, hal

ini tidak dapat diidentikkan dengan jual beli ber syarat yang dilarang oleh Rasulullah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah:

"Sesungguhnya Rasulullah SAW. melarang jual dan syarat, (Ibnu Rusdi, MA, Abdurrahman, III, tt, 73). disamping itu jual beli kredit yang ada di KUD Muncar ini juga tidak dapat diidentikan dengan dua jual beli dalam satu jual beli sebagaimana — yang dilarang oleh Rasulullah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Masud dan Abuhurairah ra.bahwa:

"sesunggunya Kasulullah SAW. melaramg dua jual beli dalam satu jual beli, (Ibnu Rusdi, II,tt,115). walaupun hadits tersebut, ada sebagian ulama' yang menafsirkan maksud hadits tersebut adalah - dua barang dengan dua harga, hal ini dapat terjadi den an dua cara:

Pertama: seorang berkata kepada lainya barang ini saya jual pepadamu dengan harga begini, dengan syarat kamu menjual rumah itu kepada saya dengan harga begini, Kedua, Salah seorang berkata barang ini saya jual padamu dengan harga satu dinar, atau barang lain ini dengan harga dua dinar, (Ibnu Rusd tt, II, 115), persyaratan jual beli ini seakan-akan

sama dengan persyaratan yang ada pada jual beli kredit yang diterapkannoleh KUD Mino Blambangan - Muncar, walaupun sebenarnya tidak sama.

Ketidak samaan diantara keduanya terletak pada setates dan fungsi persyaratan pembeli harus menjual ikannya pada KUD Mino Blambangan. Sebab keharusa ini bukanlah semata-mata karena mereka - membeli barang dari KUD secara kredit, namun keharusan itu merupakan konsessus bersama-sama semua anggota dalam rapat anggota bahwa semua anggota-KUD harus menjual hasil tangkapan ikannya kepada - koperasi.

D. Pembahasan terhadap pembagian keuntungan

Pembagian keuntungan kepada para pemegang saham pada koperasi Mino Blambangan dilakukan dalam ben tuk devidan, besar deviden tergantung pada sisa keuntungan setelah dipotong beberapa potongan yang ditentukan dalam akte pendirian.

Pembagian keuntungan diatur berdasarkan kata sepakat umum para pemegang saham sebagaimana disebut kan dalam anggaran dasar koperasi yang telah disahkan dan disetujui dalam bentuk akte notaris. (Wawancara - dengan ketua I Bapak H. Sukran).

pidalam membagi keuntungan dipakai sebagai dasar adalah jumlah saham yang disetorkan pada perseroan dan dalam akte pendirian telah disebutkan jumlah semua ter sebut.

Pembagian keuntungan menurut para fuqaha ialah yang sudah disepakati, yaitu keuntungan mengikuti modal, apabila modal syirkah itu sama besarnya, maka keuntungan antara mereka memperselisihkan apakah modal keduanya berbeda, sedang keuntungan sama.

... Menurut Imam Maliki dan Syafi'i cara yang demikian itu tidak boleh, menurut fuqaha Iraq boleh.(Ibnu-Rusdi, 1990, III, 36).

Akan tetapi menutut Al Gho. ali., bahwa keuntung an itu merupakan ketentuan dari keduanya, didalam membagi keuntungan dan kerugian adalah berdasarkan dari dua harta modal dan tidak boleh mengubah yang demikian ini dengan dibuatkan syarat. (Al-Ghojali, III, 1979, 482).

Dengan demikian dapatlah dirangkum sebagai pertimbangan adanya kemiripan bentuknya yaitu sebagai berikut:

- Didalam perhitungan sebagaimana dalam anggaran dasar perseroan koperasi Mino mlambangan dibagi menurut ha sil keputusanadan cara yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.
- Jumlah dana cadangan yang telah cukup dapat menetapkan bagian dari laba, laba yang dipisahkan untuk dana cadangan tersebut dapat dibagi.

- Bentuk keuntungan laba perseroan berupa deviden.
- Cara yang dipakai dalam membagi keuntungan dalah jumlah saham.

Sedangkan kalau dalam syirkah:

- Untung atau ruĝi dihitung berdasarkan bandingan dari besarnya modal.
- Pembagian keuntungan bandingan modalnya disepakati bersama.
- Keuntungan boleh berbeda atau sama besarnya.

Jumhr Ulama' berpendapat Ya'ni: Imam Maliki, Syafi'i, Ats Tsauri, Abu Yusuf, Muhamad bin Alhasan, dua orangterahir ini adalah pengikut Imam Abu Hanifah, serta Ahmad dan Daud semuanya memegangi kebolehan bagi hasil.

Dalam, Hadits Rasulullah bersabda: yang ber - bunyi:

إن رسولَ الله مهلى الترعليد وسلم رَفَح إلى بَهْ وَخَيْبَ خَنَا خَيْبَرَ وَارْضِهُاعلى أَنْ يَعْلَوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ التَّمِّ مِهلَى الترعليد وسلّم _ شَكْرَ هَا

"Sesungguhnya Rasulullah SAW. menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar pohon kurma dan tanah Khasibar dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka, dan bagi Rasulullah adalah separuh dari buah nya. (Ibnu Rusdi, 1990, III, 249).

Juga ditandaskan dalam suatu hadits yang dir<u>i</u> wayatkan oleh Bukhari Muslim.

ومُرْمِهِ لِللهُ عليه وسلم سَاقًا هُمُ على نِهِمْ مَا يَنْ جِنهُ الرُّرَمِنُ والشَّمْرَةُ أ

" "Sesungguhnya Rasulullah SAW. mengadakan janji siraman dengan mereka (Yahudi Khaibar) atas separuh dari hasil tanah dan buah. (Ibpu Rusdi, 1990, III, 250).

Pembahasan pembagian keuntungan diatas, yang ber dasarkan Al-hadits dan pendapat para Ulama' yang dilakukan oleh KUD Mino Blambangan sesuai dengan syirkah Inan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

